

ABSTRAK

Focus utama disertasi ini adalah pengelolaan sampah yang berbasis nilai kesejahteraan, implementasi pengelolaan sampah yang berlaku saat ini ternyata masih menggunakan paradigma lama yaitu Kumpul – Angkut – Buang, sehingga pengelolaan sampah yang ada saat ini belum memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat dan akhirnya juga tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai pengelola sampah. Pemerintah sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah masih terfokus pada pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat bukan peran aktif masyarakat yang mengolah sampah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menitik beratkan pada pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, disamping itu belum adanya Pabrik pengolah sampah plastik yang merupakan tujuan akhir dari proses pemilahan, pengumpulan, dan pemrosesan yang akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi pengelola sampah. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang optimal, sudah waktunya ada perubahan paradigma pengelolaan sampah kota. Paradigma transformatif dimaksud adalah konsep pengelolaan sampah kota yang dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat dan dampak negatif lainnya yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup.

Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan kualitatif. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode analisis interaktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pengelolaan sampah yang belum berbasis nilai kesejahteraan yaitu kegiatan pengelolaan sampah yang sampai saat ini masih menggunakan paradigma lama **Kumpul-Angkut- Buang** dan belum memberikan nilai ekonomis bagi pengelola sampah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pembinaan, dan SDM Hal ini disebabkan kurang efektifnya peran pemerintah dalam membina masyarakat dalam hal pengelolaan sampah.(2) Kelemahan – kelemahan pengelolaan sampah saat ini implementasinya merupakan kelemahan dari aspek substansi hukum berupa lemahnya peraturan, struktur hukum berupa aparat penegak hukumnya yang lemah, dan kultur hukum berupa nilai budaya masyarakat/kebiasaan yang secara turun temurun selalu membuang sampah ke sungai khusus bagi masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai. Secara legal praktis “pengelolaan sampah dengan konsep 3R” dapat dijadikan payung hukum dalam implementasi pengelolaan sampah antara masyarakat, swasta dan pemerintah didukung oleh peran aktif masyarakat yang dilakukan dengan swakelola melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah secara berkelanjutan;(3). Rekonstruksi pengelolaan sampah yang berbasis nilai kesejahteraan adalah untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang bermanfaat secara ekonomis dan aman bagi lingkungan, sementara rekonstruksi hukum terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 terdapat pada pasal 9 ayat (1) point (e), pasal 11 ayat (1) point (f) dan pasal 27 ayat 4, serta rekonstruksi hokum terhadap Perda No. 3 Tahun 2015 terdapat pada Pasal 31 ayat 2 point (d), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (2), idealnya ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut (1) Pemerintah daerah kabupaten / kota melalui BUMD atau kemitraan dengan pihak swasta membangun industri pabrik pengolah sampah menjadi barang jadi dengan bahan baku dari sampah an organik atau palstik yang telah dicacah menjadi bubur plastik, sehingga dapat menampung sampah hasil pengumpulan dan pemilahan yang dilakukan masyarakat baik secara individu maupun swakelola dimana masyarakat mendapatkan keuntungan (2)., memperoleh jaminan kesejahteraan dalam hal pengelolaan sampah baik secara individual maupun swakelola secara berkelanjutan., (3) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem sanitary land fill dan ke depan membangun incenarator tempat pembakaran sampah yang asapnya dapat menghasilkan energy listrik 4) pemerintah daerah dapat bermitra dengan swsta/badan usaha dalam penyelenggaraan PSP.dengan jaminan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat

Kata kunci : Kesejahteraan, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

The main focus of this dissertation is the management of waste based on welfare value, the management of waste implementation forcing this time use the old paradigm, namely Gathering - Taking – Removing, so the management of waste is not giving economic value and welfare to society as a waste manager. The Government as a responsible in waste management is still focused on the services that will be provided to the society whom are not active in waste management pursuant to Law No. 18 of 2008 which focused on waste management through waste reduction and handling, in addition, there is not plastic waste management factory to sort, gather, and process waste given welfare to waste manager. To achieve optimal waste management, it's time to change municipal waste management paradigm. Transformative paradigm is the concept of municipal waste management that can provide economic value to society and other negative impacts are detrimental to society and the environment.

The method used in this study is sociological juridical approach and qualitative. The data are collected through interview, observation and documentation. Analysis technique uses interactive analysis. The results of this study concluded (1) The management of waste that is not based on welfare value is waste management activities using the old paradigm Gathering - Taking - Removing and it does not give economic value to waste manager in getting welfare society. Besides the lack of infrastructure, guidance, and human resources, this is due to a lack of effective government role to foster the society in waste management. (2) the weakness of waste management is implemented by the law substance aspects such as the lack of regulations, the law structure in the form of law enforcement officers who are weak, and the law culture in the form of the society culture value / practices that have historically always throw garbage into the river specially for the community living on the riverside. Legally practical "waste management with the 3R concept" can be used as a legal basis in the implementation of waste management among the society, private and government supported by an active community role performed by self-management through waste reduction and waste management in a sustainable manner; (3) Reconstruction of the waste management based on welfare value is getting the waste management that is useful economically and safe for the environment, while the law reconstruction to Law No. 18 of 2008 contained in article 9 paragraph (1) point (e), Article 11 paragraph (1) point (f) and Article 27, paragraph 4, as well as the law reconstruction to Regulation No. 3 of 2015 contained in Article 31 paragraph 2 point (d), Article 32 paragraph (1) dan Article 60 paragraph (2), ideally in the future can be formulated as follows: (1) The Government of the district / city via BUMD or partnerships with the private sector to build waste processing factory into finished products into finished products with raw materials of inorganic or plastics which have been chopped into pulp plastic, so it can accommodate wastes gathering and sorting is done by the society, both individually and self-management in getting benefit . (2)., getting welfare benefits in terms of waste management, both individually and self-managed sustainably., (3) monitoring and periodic evaluation every 3 (three) months for 20 (twenty) years of waste final processing using system of sanitary landfill and building the Incinerator (waste combustion) that smoke can produce electrical energy, (4) the local government to partner with private / enterprises in the implementation of the PSP with guarantee can provide for the society welfare.

Keywords: Welfare, Waste Management